

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KELURAHAN TANJUNG MAS

Neti Fitriani, Tri Yuniningsih, Titik Djumiarti

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Stunting is a significant issue in Indonesia, with the rate reaching 21.5% in 2023, only a 0.1% decrease from the previous year, and not meeting the WHO target of 20% or the RPJMN 2020-2024 target of 17.8% in 2023. Tanjung Mas Village in Semarang City, as a priority area for accelerating the reduction of stunting, still recorded 89 cases of stunting, the highest in the city, while other villages have achieved zero stunting status. This study aims to analyze the implementation of the stunting reduction acceleration policy in this village, using a descriptive qualitative approach and data collection through interviews and documentation. The theory used is the policy implementation model by Van Meter and Horn. The results show that the implementation of the stunting reduction acceleration policy in Tanjung Mas Village has been quite effective. However, there are several obstacles, including the lack of training for the Head of Social Welfare in the village, a shortage of youth cadres, limited budget allocation in the village and Posyandu, and the economic and social conditions of the community.

Keywords: *Policy Implementation, Acceleration of Stunting Reduction*

ABSTRAK

Stunting merupakan isu penting di Indonesia, dengan angka mencapai 21,5% pada 2023, hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya dan tidak memenuhi target WHO sebesar 20% serta target RPJMN 2020-2024 sebesar 17,8% di tahun 2023. Kelurahan Tanjung Mas di Kota Semarang, sebagai wilayah prioritas percepatan penurunan stunting, namun masih mencatatkan 89 kasus stunting, tertinggi di kota tersebut sementara kelurahan lain telah mencapai status zero stunting. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di kelurahan tersebut, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Tanjung Mas telah berjalan cukup baik. Namun, terdapat faktor penghambat meliputi tidak adanya pelatihan bagi Kasi. Kesos kelurahan, kurangnya kader muda, terbatasnya alokasi anggaran di Kelurahan dan posyandu, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Kata Kunci: **Implementasi Kebijakan, Percepatan Penurunan Stunting**

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah program global yang disepakati oleh negara-negara dunia untuk mencapai kesejahteraan global melalui 17 tujuan dan 169 sasaran. Salah satunya, tujuan ke-2, yaitu “*zero hunger*,” berfokus pada menghilangkan kelaparan, ketahanan pangan, dan peningkatan gizi yang baik. Target 2.2 bertujuan mengurangi malnutrisi, termasuk *stunting* dan *wasting* pada anak di bawah 5 tahun, sebesar 40% pada tahun 2025.

Administrasi publik memiliki peran besar dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam pengentasan *stunting*. Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2014), administrasi publik melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya untuk merancang, menerapkan, dan mengelola kebijakan publik. Dalam hal ini, administrasi publik bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang menurunkan prevalensi *stunting*, memperbaiki gizi, serta meningkatkan akses layanan kesehatan bagi balita dan ibu hamil. Administrasi publik juga mengelola sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana guna memastikan kebijakan berjalan efektif, sehingga target penurunan *stunting* dapat tercapai.

Setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan yang dianggap sebagai tahap penentu dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan (Edwards III, 1984). Proses implementasi kebijakan ini bersifat kompleks, melibatkan berbagai pihak, tujuan, standar yang harus dipenuhi, serta faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilannya. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2018), implementasi kebijakan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, individu, atau pihak swasta untuk mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan yang baik tanpa implementasi yang efektif tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Percepatan penurunan *stunting* merupakan bagian dari kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui intervensi kesehatan, pendidikan, dan gizi. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirumuskan pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu yang memengaruhi masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh implementasi yang komprehensif, termasuk di tingkat daerah. Salah satu regulasi dasar yang mengatur percepatan penurunan *stunting* adalah Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik dan integratif melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemangku kepentingan.

Regulasi ini memiliki peran utama dalam mengatur pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.



Gambar 1. Prevalensi *Stunting* di Indonesia pada tahun 2018-2022

Sumber: bit.ly/BukuSakuSSGI2022, diolah

Prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6% dan 21,5% pada tahun 2023, masih tinggi dan belum mencapai target RPJMN, yaitu 18,4% pada 2022 dan 17,8% pada 2023, yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum berhasil menurunkan prevalensi *stunting*. Setiap pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Semarang, membuat kebijakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dengan Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kebijakan ini harus dilaksanakan hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang.

Tabel 1. Kasus *Stunting* di Kota Semarang Per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah
Semarang Utara	195
Semarang Barat	137
Semarang Tengah	69
Semarang Timur	86
Semarang Selatan	81
Ngaliyan	136
Pedurungan	116
Banyumanik	99
Tembalang	68
Mijen	80
Genuk	44
Gunung Pati	114
Gajah Mungkur	40
Gayamsari	46
Candisari	34
Tugu	41
Total	1.386

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023 (diolah)

Kecamatan Semarang Utara memiliki total 195 kasus *stunting*, menjadikannya sebagai kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak. Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan belum maksimal, mengingat kecamatan ini masih mencatatkan jumlah *stunting* tertinggi.

Tabel 2. *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara Per Kelurahan 2023

Kelurahan	Kasus <i>Stunting</i>	Persentase %
Tanjung Mas	89	45,64
Bandarharjo	57	29,23
Kuningan	23	11,79
Dadapsari	14	7,18
Bulu Lor	2	1,03
Plombokan	5	2,56
Purwosari	3	1,54
Panggung Kidul	2	1,03
Panggung Lor	0	0
Total	195	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang & Puskesmas Bandarharjo, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat kesenjangan signifikan terkait kasus balita *stunting* di Kecamatan Semarang Utara, dengan Kelurahan Tanjung Mas mencatatkan 89 kasus pada tahun 2023, yang mencakup 45,64% dari total kasus *stunting* di kecamatan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi *stunting* di kelurahan ini, termasuk menjadi lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* pada tahun 2021 melalui SK Walikota Semarang No. 050/365/V/2021, serta dijadikan *pilot project* penanganan *stunting*. Pada tahun 2022, Tanjung Mas kembali ditetapkan sebagai fokus intervensi penurunan *stunting* melalui Keputusan Walikota Semarang No. 050/209/2022 dan masuk dalam daftar Desa Lokus Prioritas 360 Kab/Kota untuk intervensi percepatan penurunan *stunting*.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, Ketua Forum Posyandu Kelurahan Tanjung Mas, pada 22 Oktober 2023, faktor utama penyebab *stunting* di kelurahan tersebut meliputi kondisi ekonomi masyarakat, banjir rob, banyaknya ibu muda yang bekerja di pabrik, serta pola asuh yang minim pengetahuan. Penelitian oleh Salsabila & Santoso (2023) juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan faktor alam yang sulit diatasi menjadi hambatan dalam peningkatan sanitasi dan pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga balita di Kelurahan Tanjung Mas masih mengalami *stunting*.

Dari data yang telah diuraikan menunjukkan tingginya jumlah kasus *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, yang membuat penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* dan mengidentifikasi hambatan di lapangan untuk menetapkan intervensi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di kelurahan tersebut menggunakan Perwali Semarang No. 27 Tahun 2022 dan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

Dengan adanya latar belakang ini, yang melandasi dibuatnya penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas”.

KERANGKA TEORI

Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2014), adalah proses mengorganisasi dan mengkoordinasikan sumber daya serta personel publik untuk merancang, menerapkan, dan mengelola kebijakan publik. Nicholas Henry (dalam Keban, 2019) menjelaskan bahwa administrasi publik

menggabungkan teori dan pelaksanaan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sementara Pasolong (2012) menambahkan bahwa administrasi publik mencakup manajemen dan organisasi sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan definisi ini, administrasi publik merupakan kolaborasi antara teori dan pelaksanaan oleh lembaga atau individu untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai kepentingan bersama. Dalam penelitian ini, teori administrasi publik relevan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

Kebijakan Publik

Thomas Dye (dalam Nugroho, 2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Pasolong (2014) menyatakan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam berbagai bidang, sementara Winarno (2007) melihatnya sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan masalah. Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik. Tahapan kebijakan publik menurut Michael Howlett dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2013) meliputi: menetapkan agenda, formulasi

kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Proses kebijakan yang relevan dengan penelitian ini adalah implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, yang dilaksanakan berdasarkan Perwali Semarang No. 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang. Pada tahap implementasi, kebijakan ini melibatkan berbagai pihak dan standar yang harus dipenuhi, serta memerlukan koordinasi yang efektif untuk mencapai tujuan penurunan prevalensi *stunting*.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan, menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Kadji, 2005:48), adalah pelaksanaan kebijakan mendasar, seperti undang-undang atau keputusan pengadilan, yang menetapkan tujuan dan metode untuk mengatasi masalah. Van Meter dan Van Horn menambahkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, implementasi sering menghadapi tantangan yang dapat menyebabkan kegagalan jika tidak dilakukan secara efektif. Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling* dan *random sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian dan interpretasi data dilakukan dalam tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data. Untuk keabsahan data menggunakan empat cara, yaitu Uji Kredibilitas, Uji Transferabilitas, Uji Dependability, dan Uji Confirmability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas

1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2-9 dan Pasal 15-16)

Perencanaan percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang dilakukan secara komprehensif melalui koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), yang melibatkan berbagai OPD terkait. Proses perencanaan dimulai dengan analisis situasi dan pemetaan masalah di lapangan, diikuti dengan rapat rutin setiap semester untuk merancang kegiatan yang sesuai, seperti pemantauan balita, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan

kesehatan. Selain itu, koordinasi antar OPD dan pemanfaatan media sosial serta platform komunikasi, seperti grup WhatsApp, juga mendukung pengelolaan data dan informasi terkait *stunting*. Mekanisme pelaksanaan melibatkan berbagai tahap, dari perencanaan hingga evaluasi, dengan partisipasi masyarakat yang penting dalam setiap tahapan, meskipun masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan orang tua balita. Pemantauan dan evaluasi program dilakukan secara berkala, dengan laporan rutin dan penggunaan aplikasi EPPGBM untuk memantau perkembangan *stunting*, memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.

Di Kelurahan Tanjung Mas, sejumlah program percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, antara lain: untuk remaja putri, program GLOWING (Gerakan Minum Tablet Tambah Darah di Sekolah); untuk calon pengantin, program Kelas Catin dan TUGU MUDA yang fokus pada kesiapan pernikahan dan pencegahan *stunting*; untuk ibu hamil, program Kelas Ibu dan Balita serta kegiatan Posyandu Rutin yang memberikan edukasi dan pemantauan kesehatan; serta untuk anak usia 0-59 bulan,

kegiatan Posyandu yang mencakup imunisasi, pemberian suplemen gizi, dan Rumah Pelita sebagai daycare penanganan *stunting*. Semua kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas keluarga, serta akses terhadap gizi dan layanan kesehatan.

Upaya percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas bertujuan mencapai target RPJMD 2021-2026, dengan target prevalensi *stunting* sebesar 4% pada 2024. Berbagai intervensi dilakukan, termasuk pemberian makanan tambahan, pemantauan gizi, dan edukasi masyarakat, yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial. Meskipun Lurah Tanjung Mas menargetkan *zero stunting* pada 2024, data menunjukkan fluktuasi jumlah kasus *stunting*, yang tercatat 78 kasus pada Juli 2024, menjadikan pencapaian target tersebut sulit terwujud. Prevalensi *stunting* di Kelurahan ini pada 2024 masih mencapai 4,9%, yang melebihi target yang ditetapkan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Semarang menetapkan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokasi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2025.

Strategi percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan melalui lima

pilar: peningkatan anggaran daerah untuk mendukung kesehatan dan sanitasi, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, perencanaan aksi konvergen lintas sektor, peningkatan gizi dan ketahanan pangan, serta penguatan sistem data, informasi, dan inovasi untuk mendukung upaya penurunan *stunting* secara efektif dan berkelanjutan.

2) Penyelenggaran Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 10 dan 11)

Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang melibatkan berbagai inisiatif lintas sektor untuk mengatasi masalah gizi dan *stunting*, termasuk Pelangi Nusantara yang menyediakan pelayanan gizi dan edukasi kesehatan, Tugu Muda untuk pencegahan *stunting* pada calon pengantin, Sanpiisan untuk kesehatan ibu dan anak, Roberto Carlos untuk ibu hamil berisiko *stunting*, Grand Maerokoco untuk pelatihan kader posyandu, Glowing untuk kesehatan remaja, serta Day Care untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan masalah gizi. Semua program bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan, pengetahuan gizi, dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan *stunting*.

Kelurahan Tanjung Mas aktif dalam koordinasi percepatan penurunan *stunting*, dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas Bandarharjo, Posyandu, dan CSR. Rapat koordinasi rutin diadakan untuk memantau perkembangan *stunting*, evaluasi program, dan perencanaan langkah selanjutnya. Kelurahan juga mengalokasikan dana dari APBD untuk mendukung program *stunting*, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) di posyandu. Meski demikian, dana sering kali tidak digunakan secara optimal, lebih terfokus pada PMT daripada intervensi lain. Program seperti pendampingan kepada keluarga balita *stunting* dan edukasi melalui pendekatan *door-to-door* dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi dan pola asuh yang tepat, meskipun menghadapi tantangan partisipasi orang tua dan penolakan terhadap intervensi.

3) Koordinasi Penyelenggaran Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 12 dan Pasal 14)

Koordinasi percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang dilakukan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat kota hingga kelurahan, sesuai dengan Perwal No. 27 Tahun 2022. TPPS Kota Semarang terdiri dari berbagai OPD

yang saling berkolaborasi, dengan tugas utama mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program *stunting*. Di tingkat kelurahan, TPPS mengkoordinasikan kegiatan seperti pengumpulan data balita *stunting* dan penyuluhan, serta memastikan intervensi tepat sasaran.

4) Pendanaan (Pasal 17)

Sumber daya keuangan memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting*, dengan pendanaan utama berasal dari APBD Kota Semarang dan sumber lain yang sah, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, pendirian daycare, pelatihan kader, dan audit gizi buruk. Puskesmas Bandarharjo juga mengandalkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana dari provinsi untuk mendukung program terkait *stunting*, termasuk PMT, intervensi gizi buruk, serta penyuluhan kesehatan. Semua dana ini dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perwal No. 27 Tahun 2022.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Standar dan Sasaran

Perwal Semarang No. 27 Tahun 2022, yang mengacu pada Perpres No. 72 Tahun 2021, menetapkan kebijakan yang mencakup kelompok sasaran, tujuan, dan target yang harus dicapai, dengan target prevalensi *stunting* di Kota Semarang sebesar 4% pada tahun 2026, yang kemudian diubah menjadi 2024 dalam Perwal No. 45 tahun 2023.

Kemudian, kelompok sasaran yang ditetapkan meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita, yang merupakan bagian dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta remaja putri yang berpotensi menjadi ibu hamil.

2. Sumber daya

Di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Puskesmas Bandarharjo, tenaga pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, seperti gizi dan kesehatan masyarakat, serta cukup untuk menjalankan tugasnya. Namun, di Kelurahan Tanjung Mas, pegawai Kasi Kesos tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan tidak mendapatkan pelatihan terkait *stunting*, yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kader posyandu, meski sebagian besar berusia lanjut, tetap memiliki

kompetensi yang memadai karena pelatihan rutin, meskipun sulit menarik kader muda.

Di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Puskesmas Bandarharjo, anggaran untuk program *stunting* sudah cukup, dengan sumber dana berasal dari APBD, APBN, dan bantuan dari pemerintah provinsi, mencakup PMT, pelatihan kader, pemeriksaan gizi buruk, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Di Kelurahan Tanjung Mas, meskipun ada anggaran sebesar 50 juta untuk PMT, dana operasional untuk program *stunting* lainnya belum tersedia, sehingga posyandu bergantung pada dana swadaya dari iuran RW. Kondisi ini membatasi upaya posyandu dalam menangani *stunting* secara efektif.

Dinas Kesehatan Kota Semarang telah menyediakan fasilitas seperti daycare Rumah Pelita dan Rumah Gizi, serta alat antropometri untuk memantau gizi dan *stunting*. Puskesmas Bandarharjo juga menyediakan fasilitas edukasi melalui kelas-kelas dan pelatihan kader posyandu, serta melakukan intervensi PMT. Posyandu di Kelurahan Tanjung Mas memiliki sarana yang memadai, termasuk alat pengukur antropometri dan timbangan digital untuk identifikasi *stunting* pada balita.

Ketersediaan fasilitas ini mendukung upaya penurunan *stunting* yang efektif di wilayah tersebut.

3. Komunikasi antar badan pelaksana

Koordinasi pendataan dan pelaporan dilakukan secara bertingkat mulai dari kader posyandu tingkat RW, Kasi Kesos Kelurahan Tanjung Mas, Puskesmas Bandarharjo, hingga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang. Komunikasi berlangsung melalui pertemuan dan grup WhatsApp yang melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas Bandarharjo, Kelurahan Tanjung Mas, dan posyandu. Informasi juga dibagikan melalui media sosial dan website masing-masing. Rapat rutin membahas perkembangan program, evaluasi, dan kendala di tingkat kota maupun kelurahan.

4. Karakteristik badan pelaksana

Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kelurahan Tanjung Mas, Puskesmas Bandarharjo, dan Posyandu di Kelurahan Tanjung Mas memiliki struktur organisasi yang jelas, yang mendukung efektivitas penanganan *stunting*. Dinas Kesehatan Semarang memiliki bidang kesehatan masyarakat yang mencakup seksi gizi dengan tugas melaksanakan program gizi, evaluasi puskesmas, serta surveilans gizi. Kelurahan Tanjung Mas, melalui Kasi

Kesejahteraan Sosial, bertanggung jawab mendata, melaporkan, memberikan edukasi, dan mendampingi keluarga dengan anak *stunting*, serta menyalurkan bantuan. Puskesmas Bandarharjo mengumpulkan data balita *stunting*, memantau status gizi, dan memberikan edukasi serta pelatihan kader posyandu. Posyandu di Kelurahan Tanjung Mas berperan dalam pemantauan gizi balita, melaporkan kasus *stunting*, serta menyalurkan bantuan dan PMT.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas mayoritas tergolong menengah ke bawah, dengan banyak penduduk bekerja sebagai buruh pabrik dan nelayan, yang mengakibatkan pendapatan rendah. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, karena prioritas pengeluaran seringkali dialihkan untuk kebutuhan lain seperti rokok atau renovasi rumah. Akibatnya, pemenuhan gizi anak terabaikan, yang berkontribusi pada masalah *stunting* di wilayah ini. Meskipun Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kelurahan Tanjung Mas, Puskesmas Bandarharjo, dan CSR memberikan bantuan PMT serta edukasi, kondisi ekonomi tetap

menjadi hambatan besar dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

Kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas menghadapi hambatan dalam penurunan *stunting*, terutama terkait stigma negatif terhadap istilah "*stunting*" dan kebiasaan pola asuh yang turun-temurun tanpa pengetahuan gizi yang memadai. Meskipun sebagian masyarakat mendukung program penurunan *stunting*, masih ada penolakan, terutama dari orang tua yang merasa tersinggung jika anak mereka disebut *stunting*. Beberapa orang tua juga mengandalkan pola makan yang kurang tepat, seperti memberikan jajanan instan sebelum jam makan. Untuk mengatasi hal ini, Puskesmas dan posyandu menggunakan pendekatan lembut, mengganti istilah "*stunting*" dengan "balita istimewa" dan terus mengedukasi masyarakat mengenai pola asuh yang sehat.

Dukungan politik dalam penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas melibatkan peran pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah menyediakan dana, program edukasi, alat kesehatan, serta fasilitas gizi, sementara Kelurahan Tanjung Mas berperan dalam koordinasi dan pendampingan. Puskesmas

Bandarharjo juga mendukung dengan pemberian PMT dan pelatihan kader. Sektor swasta, melalui CSR, turut berkontribusi, seperti Tanoto Foundation yang menyediakan kelas pola asuh dan PT PLN Indonesia Power Semarang yang memberikan bantuan PMT serta infrastruktur. Semua pihak bekerja sama untuk menangani masalah *stunting* di kelurahan ini.

6. Disposisi

Perwal Semarang No. 27 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan *stunting* diterapkan dengan pendekatan top-down, yang meski tidak melibatkan banyak partisipasi dari pelaksana lapangan, mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

Pelaksana kebijakan ini memahami tujuan dan sasaran kebijakan, yang menargetkan penurunan prevalensi *stunting* hingga 4% dengan intervensi pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan remaja.

Komitmen tinggi terhadap pencapaian tujuan tersebut tercermin dari motivasi para implementor yang berkolaborasi aktif dalam koordinasi, pelatihan, dan pemberian bantuan untuk memastikan kebijakan berhasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas menggunakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan walikota tersebut.

Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter & Carl Van Horn (dalam Mulyadi, 2018), yaitu:

- a. Faktor pendukung mencakup adanya standar dan sasaran yang jelas dan terukur; sumber daya manusia yang kompeten di DKK Semarang, Puskesmas Bandarharjo, dan Posyandu Tanjung Mas; anggaran yang memadai di DKK Semarang dan Puskesmas Bandarharjo; ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; pelaksanaan komunikasi dan koordinasi antar badan pelaksana berjalan baik melalui rapat rutin dari level kota hingga lokal/kelurahan dan penggunaan media sosial; semua badan pelaksana telah memiliki struktur organisasi yang jelas; dukungan politik dari pemerintah dan *stakeholders* melalui berbagai bantuan

yang disalurkan; dan disposisi pelaksana yang baik dengan adanya komitmen dan motivasi yang kuat dalam menjalankan tugas masing-masing.

- b. Terdapat faktor penghambat seperti kurangnya kompetensi pegawai Kasi Kesos Kelurahan karena koordinator *stunting* tidak relevan dengan riwayat pendidikan dan tidak diberikan pelatihan; usia kader posyandu yang mayoritas di atas 40 tahun; alokasi anggaran di Kelurahan Tanjung Mas belum optimal dan kurang memadainya anggaran di posyandu; kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong menengah ke bawah dan adanya asumsi yang salah terkait *stunting*; serta kondisi sosial adanya penolakan intervensi dengan PMT, kurangnya partisipasi orang tua balita datang ke posyandu, dan pola asuh masih didasari menurut budaya turun temurun.

SARAN

- Adapun saran yang direkomendasi oleh penulis sebagai masukan yaitu:
1. Peningkatan kompetensi Kasi Kesos Kelurahan
Pelatihan terkait masalah *stunting* diperlukan untuk koordinator agar memahami faktor penyebab dan dampaknya, memudahkan edukasi masyarakat dan identifikasi intervensi yang tepat. Pelatihan ini dapat melibatkan

Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan CSR, dengan harapan meningkatkan kompetensi, kepercayaan masyarakat, serta partisipasi dan pengetahuan Kasi. Kesos.

2. Kurangnya kader usia muda

Kader tiap Posyandu Tanjung Mas perlu melakukan regenerasi dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi menjadi kader agar dilibatkan dalam kegiatan Posyandu, sehingga ketika calon kader siap menjadi kader maka kader yang berusia tua dapat digantikan. Program rekrutmen, pelatihan, pemberian insentif bagi kader muda perlu dikembangkan untuk menarik generasi baru.

3. Alokasi anggaran di Kelurahan dan Posyandu

Kelurahan menambah alokasi dana dari Pemerintah Kota untuk menunjang beragam program dan kegiatan penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. Agar masyarakat tidak harus mengeluarkan iuran kolektif untuk pelaksanaan program di posyandu.

4. Masalah kondisi ekonomi dan sosial

Pendekatan internal kepada orang tua balita yang menolak intervensi PMT dan kurang partisipasi di posyandu masih diperlukan, dengan mengedepankan edukasi dan konseling pribadi antara orang tua dan tenaga gizi. Untuk mendorong partisipasi, kegiatan menarik seperti lomba balita sehat, lomba kreativitas makanan,

dan makan bersama di posyandu dapat diadakan. Selain itu, pengembangan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta koordinasi posyandu dengan pengasuh balita mengenai pentingnya gizi dan pengasuhan yang benar, dengan modul bacaan untuk orang tua. Program ini dapat melibatkan CSR dan Dinas terkait, seperti DP3A Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes. (2023). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/laporan-hasil-survei/>
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2023). Diakses dari <http://119.2.50.170:9095/dashboardNew/index.php/home/stunting?bulan=08&tahun=2023>
- Kadji, Yulianto. (2005). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realita)*. Gorontalo: UNG Press. <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/2621/yulianto-kadji-buku-formulasi-dan-implementasi-kebijakan-publik.html>
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (Edisi 4). Yogyakarta: Gava Media.
- Keputusan Walikota Semarang No. 050/365/2021 tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting di Kota Semarang Tahun 2021. Diakses dari <https://stunting.semarangkota.go.id/uploa>

ds/lokus_years/20230126114559-2023-01-26lokus_years114557.pdf

- Mulyadi, Deddy. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik* (H. T. Gedeona & M. Nurafandi, Eds.; 3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang
- Salsabila, F. S., & Santoso, R. S. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1–22. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/42468/30524>
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.